



**ANALISIS TERHADAP INPRES NOMOR 9 TAHUN 2020 DALAM  
KAITANNYA PENYELENGGARAAN PON PAPUA 2021**

**Methodius Kossay**

Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

methodius.kossay@gmail.com

Diterima:

**27 Agustus  
2021**

Direvisi:

**28 Agustus  
2021**

Disetujui:

**14 September  
2021**

**Abstrak**

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di Papua adalah dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021 dan upaya apa yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai bahan hukum utama dalam melakukan telaah dan analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021 adalah Sinergitas, kolaboratif dan kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam keterlibatan untuk ikut mendukung dan menyukseskan PON Papua 2021. Sinergitas dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh stekholder dalam ikut mendukung dan menyukseskan PON Papua 2021.

**Kata kunci : Analisis, Inpres 9 Tahun 2020, PON Papua 2021**

**Abstract**

*One of the government's policies in the welfare of the people in Papua is the issuance of Presidential Instruction No. 9 of 2021 on Accelerating Welfare Development in Papua province and West Papua province. This research aims to find out what efforts should be made in the implementation of Presidential Decree No. 9 of 2020 on Accelerating The Development of Welfare of Papua Province and West Papua Province in relation to the implementation of PON Papua 2021 and what efforts should be made in the implementation of Presidential Decree No. 9 of 2020 in relation to the implementation of PON Papua 2021. The research method used is with a normative juridical approach, namely Presidential Decree No. 9 of 2020 on Accelerating Welfare Development in Papua Province and West Papua Province as the main legal material in conducting review and analysis. The conclusion of this study is that efforts must be made in the implementation of Presidential Decree Number 9 of 2020 in relation to the implementation of PON Papua 2021 is Synergy, collaborative and community concern to play an active role in involvement to support and succeed PON Papua 2021. Synergy and collaboration between stakeholders in this case the Central Government, Provincial / Regency and Municipal Governments, NGOs, Religious Leaders, Community Leaders and all stekholders in supporting and succeeding PON Papua 2021.*

**Keywords : Analysis, Presidential Decree 9 of 2020, PON Papua 2021**

## **PENDAHULUAN**

Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua (Pugu et al., 2020) dan Provinsi Papua Barat ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Peraturan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang diperlukan dalam langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (Budiarto et al., 2018) dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

Agar dilaksanakan dengan strategi pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (Hai, 2021), terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nabilah, 2021) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi (Yuniko & Putra, 2017), pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya (Taum, 2015), wilayah adat dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan (Toansiba et al., 2021) dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP); percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) (Mani, 2020) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara dan pegunungan yang sulit dijangkau (Limi & Yunus, 2016); pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal (Nurhasanah et al., 2017) dan tokoh adat dalam pengawasan (Dova et al., 2016) dan peningkatan kualitas pelayanan publik; pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua (Elisabeth, 2021).

Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 tahun 2020 ini sampai dengan saat ini belum memberikan dampak secara signifikan bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, momen pelaksanaan PON XX Papua 2021 ini bisa menjadi salah satu implementasi yang memberikan dampak secara signifikan bagi Papua. Meskipun hanya 13 hari efektif sejak dilaksanakan pada 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021.

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan Pesta Olahraga Nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI (Prasetyo & Sakti, 2015). PON diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia (Syabandiyah, 2017). Pelaksanaan PON Papua 2021 ini diharapkan akan memberikan dampak signifikan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 dalam percepatan pembangunan kesejahteraan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Berbagai upaya harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2021 dalam pelaksanaan PON Papua 2021. Oleh karena itu, hal tersebut dapat memberikan dampak positif dalam berbagai sektor dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 ini dalam memberikan kesejahteraan di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori (Fithri, 2018), konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, penulis mengambil Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua

dan Provinsi Papua Barat sebagai bahan hukum utama dalam melakukan telaahan dan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya yang Harus Dilakukan dalam Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 dalam Kaitannya Penyelenggaraan PON Papua 2021

Pekan Olahraga Nasional XX, disingkat PON XX, atau PON Papua 2021 adalah ajang olahraga nasional utama Pekan Olahraga Nasional, yang diselenggarakan di Papua. Pekan Olahraga Nasional 2020 akan berlangsung pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Penyelenggaraan PON seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020 tertunda akibat pandemi Covid-19. Maka pada bulan Oktober 2021 PON XX akan tetap dilaksanakan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman mengungkapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal yakni pada tanggal 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. PON nantinya akan digelar 4 kluster antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.

Penyelenggaraan PON XX yang akan berlangsung di Papua pada bulan Oktober 2021. Akan menjadi momen yang terbaik bagi Papua sebagai tuan rumah dan ajang partisipasi masyarakat dalam memeriahkan PON di Papua. Keterlibatan masyarakat Papua untuk mensukseskan PON XX Papua 2021 sangat diperlukan dan akan memberikan dampak positif. Kehadiran PON XX Papua 2021 ini memberikan dampak positif yang juga bukti implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, walaupun PON XX Papua 2021 hanya dilaksanakan dalam kurun waktu 13 hari efektif sejak dimulainya tanggal 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021.

Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 ini sebagai legitimasi dalam menyelenggarakan PON XX Papua 2021. Dimana Inpres Nomor 9 tahun 2020 ini mengintruksikan kepada menteri-menteri di berbagai bidang, staf khusus kepresidenan, penegak hukum, Gubernur Papua dan Papua Barat, Bupati/Wali Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melakukan langkah-langkah terobosan terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat di Provinsi Papua dan Papua Barat. PON XX Papua 2021 merupakan momen yang terbaik dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2021 dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dan sinergitas dengan pemangku kepentingan.

Selain Inpres Nomor 9 tahun 2020 ini, untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua 2021 Presiden Joko Widodo menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2021 tentang dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan *Paralympic* Nasional (PEPARNAS) XVI tahun 2021 di Provinsi Papua. Inpres Nomor 4 tahun 2021 ini diterbitkan sejak tanggal 10 Agustus 2021 oleh Presiden Joko Widodo dalam menjamin kesuksesan pelaksanaan PON XX Papua 2021. Jika ingin mengupayakan mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua 2021 sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2021 ini maka berbagai upaya harus ditempuh dan dilakukan untuk bisa bersinergi dengan melibatkan seluruh lampiran masyarakat di Papua. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, generasi muda Papua, LSM, pelaku-pelaku usaha, akademisi dan seluruh masyarakat dalam 7 wilayah adat yang tersebar di Papua dan Papua Barat sangat di perlukan dalam melaksanakan PON XX Papua 2021. Penelitian ini menyadari momen PON XX Papua 2021 belum tentu bisa

memberikan solusi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Papua. namun penulis berharap dengan diselenggarakannya PON XX Papua 2021 ini bisa memberikan dampak positif dalam mengangkat potensi-potensi lokal dan berbagai sektor bidang di Papua yang juga ikut terlibat dan sumbangsih dalam perhelatan PON XX Papua 2021.

Salah satu faktor penentu keberhasilan PON XX Papua 2021 adalah sinergitas, kolaboratif dan kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam keterlibatan untuk ikut mendukung dan mensukseskan PON XX 2021. Termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON di Papua tahun 2021 adalah sinergitas, kolaboratif dan kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam keterlibatan untuk ikut mendukung dan mensukseskan PON XX 2021. Sinergitas dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam ikut mendukung dan mensukseskan PON XX Papua 2021.

### **BIBLIOGRAFI**

- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM PRESS.
- Dova, H. S., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2016). *Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo*. Lampung University.
- Elisabeth, A. (2021). *Mosaik Cenderawasih-Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69–89.
- Hai, K. A. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(7).
- Limi, M. A., & Yunus, L. (2016). Analisis Potensi Dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AGRIBISNIS*, 47–62.
- Mani, B. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, 6(1), 131–142.
- Nabilah, A. (2021). *Evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggunakan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurhasanah, I. S., Alvi, N. N., & Persada, C. (2017). Perwujudan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung. *Tata Loka*, 19(2), 117–128.
- Prasetyo, R. F., & Sakti, H. (2015). *Bagimu Negeri, Aku Mengabdikan: Gambaran Loyalitas Pada Atlet Pon Provinsi Jawa Tengah*. Diponegoro University.

- Pugu, M. R., Yani, Y. M., & Wardhana, W. (2020). Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Papua: Upaya Menjamin Human Security dan Melawan Perdagangan Illegal Lintas Batas. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 76–92.
- Syabandyah, F. (2017). Pembangunan Aplikasi Informasi Lokasi Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat 2016 Berbasis Android. *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi Dan Elektronika*, 1(1), 42–53.
- Taum, Y. Y. (2015). Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya. *Jurnal Penelitian*, 19(1).
- Toansiba, M., Katmo, E. T. R., & Krisnawati, K. (2021). Pengelolaan Tanah dalam Pengetahuan Lokal dan Praktik Pertanian Berkelanjutan pada Masyarakat Arfak, Papua Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 00.
- Yuniko, F. T., & Putra, F. K. (2017). Penerapan teknologi informasi web programming untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kebijakan administrasi kependudukan. *Journal of Information Systems and Informatics Engineering*, 1(1), 13–19.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**